

eJournal Ilmu Pemerintahan, 11 (1): 2023 : 179-188  
ISSN 2541-674x (Cetak), [ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id)  
© Copyright 2023

**EFEKTIFITAS PEMBANGUNAN  
PRASARANA DI KECAMATAN KRAYAN  
TIMUR KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA**

**Rolly Juliantho Ramlu, Anwar, Budiman**

**eJournal Ilmu Pemerintahan  
Volume 11, Nomor 1 , 2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

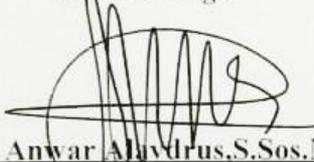
Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut :

Judul : Efektifitas Pembangunan Prasarana di Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara  
Pengarang : Rolly Juliantho Ramli  
NIM : 1502025064  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul.

Samarinda, 9 Januari 2023

Pembimbing I



Dr. Anwar Alhydrus, S.Sos, MM.  
NIP. 19710226 200212 002

Pembimbing II,



Budiman, S.IP, M.Si  
NIP. 19770712 200501 1 003

*Bagian di bawah ini*

**DISI OLEH STAF PRODI YANG DITUGASKAN**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : **eJournal Ilmu Pemerintahan**  
Volume : **11**  
Nomor : **1**  
Tahun : **2023**  
Halaman : **178-188**

# **EFEKTIFITAS PEMBANGUNAN PRASARANA DI KECAMATAN KRAYAN TIMUR KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**Rolly Juliantho Ramli,<sup>1</sup> Anwar,<sup>2</sup> Budiman<sup>3</sup>**

## ***Abstrak***

*Penelitian dimaksudkan untuk Mengetahui Efektivitas Pembangunan Prasarana Di Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif dengan menggunakan Fokus Penelitian yaitu Produksi Kemampuan Organisasi Untuk Memproduksi Jumlah dan Mutuoutput Sesuai Dengan Permintaan Lingkungan, Pencapaian kuantitas pekerja/jasa yang dihasilkan, Kualitas yang dihasilkan oleh organisasi, Kepuasan untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan sumber data yaitu Camat Kecamatan Krayan Timur, Sekretaris Camat, Stafkantor Kecamatan Krayan, Kepala Desa, Tokoh besar Kecamatan Krayan Timur dan Masyarakat Kecamatan Krayan Timur. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Temuan dalam penelitian ini yaitu Pemekaran Kecamatan Krayan Timur sangat berdampak positif bagi Masyarakat Kecamatan Krayan Timur, karena dengan pemekaran tersebut pembangunan sarana dan prasarana meningkat bila dibandingkan sebelum pemekaran. Pasca pemekaran banyak sarana dan prasarana publik yang dibangun pemerintah di Kecamatan Krayan Timur, Masyarakat berharap kepada pemerintah agar dapat meningkatkan pembangunan di Kecamatan Krayan Timur.*

***Kata Kunci : Efektifitas, Pembangunan, Prasarana***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rolyjuliantho3@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

## **Pendahuluan**

Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan saat ini direvisi kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014. Dewasa ini yang tidak dapat dipungkiri bahwa pemekaran wilayah ini dapat memberikan dampak yang baik maupun dampak yang buruk. Pemekaran wilayah bertujuan untuk memajukan pembangunan dengan cepat serta meningkatkan pelayanan publik yang Lebih baik kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan peluang yang besar bagi suatu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan manusia serta luas wilayah untuk dimekarkan menjadi beberapa daerah. Hal ini dimaksudkan agar mobilisasi dan percepatan proses pertumbuhan dan pembangunan dapat menyentuh serta menjangkau segenap aspek kehidupan masyarakat hingga ke daerah-daerah terpencil. Banyak daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau pembangunan secara maksimal. Begitu juga dari sisi pelayanan terhadap masyarakat, maka dengan diperkecilnya wilayah administratif tentu akan memperpendek rentang kendali pelayanan.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur beberapa prasyarat bagi adanya pemekaran wilayah. Syarat tersebut antara lain syarat teknis, fisik kewilayahan, dan administratif. Demikian juga dalam Pasal 222 UU No 23 Tahun 2014 menjelaskan mengenai persyaratan dasar, teknis, dan administratif, dalam pengadaan pemekaran suatu wilayah. Tujuan dari pemekaran wilayah adalah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Melihat sisi positif pemekaran daerah adalah untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan suatu daerah. Hanya yang pasti, dengan pemekaran daerah mempunyai peluang untuk lebih diperhatikan dan keluar dari ketertinggalan. Bagaimana tidak, dengan menjadi daerah otonom maka pembangunan daerah lebih maju dan pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran yang dikelola sendiri yang dapat digunakan untuk membangun daerah tersebut. Pemekaran Kecamatan harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tentunya memerlukan waktu. Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dimana terdapat Wilayah Kecamatan yang akan dimekarkan tentunya sangat memahami aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan secara lebih optimal.

Kecamatan atau yang disebut dengan kata lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang di pimpin oleh camat. (UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). Menurut Widjaja (2005:26) kecamatan adalah satu organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah dancara untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tersebut adalah dengan pemekaran kecamatan dengan melihat kenyataan bahwa pelaksanaannya berpengaruh baik atau buruk terhadap peningkatan pelayanan.

Pemekaran kecamatan yang semula hanya satu wilayah kemudian dibagi menjadi dua kecamatan bukan hal yang mudah, dimana pemekaran harus membutuhkan personil yang cukup, harus memiliki kantor kecamatan sendiri, membutuhkan fasilitas kantor

lainnya termasuk di dalamnya biaya rutin yang kesemuanya itu dimaksudkan agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan di kecamatan. Setelah dilakukannya pemekaran kecamatan, yang perlu dipersoalkan adalah pelayanan pemerintah terhadap masyarakat akan menjadi lebih baik. Dari perubahan tersebut dampak yang dapat dinikmati oleh masyarakat dengan adanya pemekaran kecamatan adalah masyarakat dapat lebih cepat dalam pelayanan dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Contoh pemekaran Kecamatan salah satunya adalah di kabupaten Nunukan, Dimana pada awalnya hanya ada 1 kecamatan, tetapi Sejak tahun 2016 sampai sekarang ada 5 kecamatan baru yang telah di bentuk/dimekarkan yakni: Krayan Induk, Krayan Tengah, Krayan Selatan, Krayan Barat, dan Krayan Timur. Alasan pemekaran kecamatan terjadi karena adanya tuntutan dan keluhan dari masyarakat kepada kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat di desa masing-masing.

Kecamatan Krayan Timur adalah merupakan salah satu dari 5 kecamatan yang di bentuk/dimekarkan. Krayan Timur salah satu daerah yang cukup banyak penduduknya dan luas tanah di daerah Krayan Timur juga tidak kalah luas tanahnya dengan Kecamatan Krayan yang lainnya. Di Kecamatan Krayan Timur, dari tahun 2016 hingga sekarang, pembangunan prasarana listrik belum dapat dirasakan diseluruh rumah tangga, dan untuk pelayanan telepon dari Telkom belum dapat menjangkau, sementara kondisi kondisi jalan di Kecamatan Krayan Timur belum terlalu baik. Maka dari itu perlu di lihat bagai mana pembangunan prasarana pasca pemekaran yang terjadi.

Pemekaran pada dasarnya memiliki beberapa tujuan yang harus dicapai. dimana tujuan pemekaran daerah yakni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dimaksud, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan seiring dengan pemekaran yang terjadi yaitu bagaimana pemerintahan berlangsung dan bagaimana dampaknya di masyarakat setelah pemekaran tersebut berjalan. Artinya, pemekaran tersebut harus mempunyai implikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya dengan adanya percepatan pembangunan di wilayah yang dimekarkan tersebut.

Salah satu pembangunan yang diharapkan meningkat adalah pembangunan prasarana. Ketersediaan prasarana menjadi hal yang penting bagi suatu daerah, karena kegagalan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya tidak hanya karena keterbatasan bahan mentah maupun tenaga kerja, tetapi karena keterbatasan dalam hal berbagai prasarana yang tersedia di daerah. Maka dari itu perlu pembangunan prasarana untuk dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki daerah.

Di Kecamatan Krayan Timur, dari tahun 2016 hingga sekarang, pembangunan prasarana listrik belum dapat dirasakan diseluruh rumah tangga, dan untuk pelayanan telepon dari Telkom belum dapat menjangkau, sementara kondisi kondisi jalan di Kecamatan Krayan Timur belum terlalu baik. Maka dari itu perlu di lihat bagai mana pembangunan prasarana pasca pemekaran yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah adalah seberapa efektif pembangunan prasarana di Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Pemekaran Kecamatan?

## **Teori dan Konsep**

### ***Efektifitas***

Menurut Abdurahmat (2003: 92) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Kemudian menurut Sondang P. Siagian (2001: 24) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Selanjutnya Atmosoeperto (2002: 139) menyatakan, efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat.

Jadi dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personal, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

### ***Indikator Efektifitas***

Menurut Barnard dalam Prawirosentono (2008: 27) yang mengatakan bahwa efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan saranan kebijakan program yang telah ditetapkan, dengan definisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian, yaitu dimensi efektivitas program. Dimensi Efektifitas Program diuraikan menjadi indikator yaitu sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan program
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan program
- c. Perumusan kebijakan program yang mantap
- d. Penyusunan program yang tepat
- e. Penyediaan sarana dan prasarana
- f. Efektifitas operasional program
- g. Efektifitas fungsional program
- h. Efektifitas sasaran program
- i. Efektifitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program
- j. Efektifitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program

### ***Pembangunan***

Menurut Syamsi Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri (2006:15) pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan admnistrasi yang baik.

Kemudian Menurut nation-building Sondang P. Siagian (2001:4) administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu tentang admnistrasi dan tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-

keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Dari berbagai pendapat diatas dapat diketahui bahwa pembangunan adalah suatu usaha perubahan yang berencana yang tanpa akhir dengan melalui tahapan-tahapan dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan juga dilakukan dengan mengikut sertakan seluruh masyarakat dalam suatu Negara.

### ***Prasarana***

Menurut Jayadinata (1992 dalam Juliawan,2015:5) prasarana merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjaladengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai, prasarana kota merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota. Dengan demikian prasarana kota merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota, yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota.

Sedangkan menurut Grigg ( 1988 dalam Kodoatie,2005:8) prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (spatial space) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Infrastruktur metujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Maka dapat dipahami bahwa prasarana merupakan kerangka dasar dari suatu sistem, kerangka dasar tersebut menjadi fasilitas umum dan pelengkapan dasar fisik yang memungkinkan lingkungan untuk berfungsi sebagaimana mestinya, serta menjadi penentu keberhasilan daru suatu perkembangan kota.

### ***Manfaat prasarana***

Manfaat prasarana berikut ini beberapa manfaat dari pengadaan prasarana atau infrastruktur terhadap suatu wilayah:

- a. Membantu menambah daya dukung lingkungan atau mengurangi beban lingkungan
- b. Melesatarikan alam lingkungan
- c. Mendukung kegiatan
- d. Meningkatkan interaksi sosial, ekonomi, dan kebudayaan
- e. Mengurangi jarak dan waktu, memudahkan, meringankan pembiayaan
- f. Merepresentasikan kemampuan suatu wilayah

### ***Metode Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun fokus penelitian ini antara lain adalah:

1. Efektifitas pembangunan prasarana di ukur dari:
  - a. Pencapaian tujuan pembangunan prasarana
  - b. Pencapaian target pembangunan prasarana
    1. Kuantitas

## 2. Kualitas

- c. Kepuasan masyarakat terhadap pembangunan prasarana
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan prasarana di Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Pemekaran Kecamatan

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu: Data primer dan data sekunder. *Key informan* sebagai sumber data primer adalah Camat Krayan Timur, Pegawai Kecamatan dan Tokoh masyarakat. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen, arsip dan laporan terkait dengan Efektifitas pembangunan prasarana di Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) tinjauan pustaka (*library research*), (2) Penelitian lapangan (*field work research*) yaitu melalui observasi, wawancara dan penelitian dokumen. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah metode analisis kualitatif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) yang meliputi kegiatan: (1) Kondensasi Data (*Data Condensation*), (2) Penyajian Data (*Data Display*), (3) Penyimpulan/Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*)

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Efektifitas Pembangunan Prasarana di Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

#### a. Pencapaian tujuan pembangunan prasarana

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tujuan pembangunan prasarana adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan hal ini pembangunan dilaksanakan terus-menerus sebagai suatu proses agar mampu tercapai keadaan masyarakat yang semakin membaik.

Pembangunan jalan sudah sesuai dengan apa yang menjadi Tujuan pembangunannya. dimana dulu masyarakat krayan timur yang ingin ke kecamatan krayan induk untuk berbelanja atau menjual hasil panennya harus menunggu cuaca yang bagus agar bisa dapat dilewati, karena kalau hujan akses jalan kecamatan krayan timur menuju ke kecamatan krayan induk tidak dapat dilalui motor atau pun mobil, dan juga memakan waktu jam yang sangat lama, tapi dengan ada nya pembangunan jalan kini masyarakat krayan timur lebih mudah akses perjalannya, yang dulu perjalanan menuju ke kecamatan krayan induk sekitar 3 jam sampai 4 jam lamanya, tapi sekarang hanya 1 jam saja. pembangunan sekolah sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembangunannya. supaya gedung sekolah SD dan SMP tidak satu gedung lagi, dan tidak mengganggu proses mengajar SD ataupun SMP nya. pembangunan gereja sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembangunannya. supaya masyarakat krayan timur beribadah tidak lagi harus dilamin. Pembangunan lapangan sepak bola dan volly sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembangunannya. agar memiliki lapangan yang layak di pergunakan dengan seutuhnya.

Raharjo 2013 yang mengatakan bahwa tujuan pembangunan prasarana desa adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai sosial, ekonomi,

pendidikan, sarana kesehatan, budaya, agama, politik, dan keamanan, secara berkesinambungan dengan tetap mendapatkan kesamaan hak menjunjung tinggi keadilan masyarakat.

Dengan demikian pencapaian tujuan pembangunan prasarana Pembangunan kantor kecamatan sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembangunannya. Masyarakat krayan timur yang selama ini berurusan di kecamatan krayan induk tidak jauh lagi berurusan. yang dulunya masyarakat jauh-jauh dari kecamatan timur berurusan di kantor kecamatan krayan induk, kini tidak lagi. Pembangunan puskesmas sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembangunannya. masyarakat krayan timur yang selama ini berobat di kecamatan krayan induk tidak harus ke krayan induk lagi.

**b. *Pencapaian target pembangunan prasarana***

**1. *Kuantitas***

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktifitas yang telah diselesaikan. Dengan demikian bahwa kuantitas, target bisa tercapai, dan sesuai dengan hasil dari kesepakatan masyarakat dalam musrembang yang dilakukan di Kecamatan Krayan Timur. pembangunan prasarana yang telah dibangun sudah dapat di rasakan masyarakat krayan timur baik dari segi pembangunan jalan, sekolah, gereja, kantor camat, lapangan olah raga dan puskesmas.

**2. *Kualitas***

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pencapaian kualitas pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan krayan timur sudah memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan bersama. Dengan demikian bahwa kualitas pembangunan prasarana yang dihasilkan sudah sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama masyarakat kecamatan krayan timur sudah memadai dan terrealisasi dengan baik.

**c. *Kepuasan masyarakat terhadap pembangunan prasarana***

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak puas dengan pembangunan prasarana desa yang merupakan hasil dari musrembang yang ada, hal ini dikarenakan masyarakat menilai bahwa pembangunan ini bukan merupakan prioritas dan kebutuhan dari masyarakat yang ada, namun ada juga masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya pembangunan prasarana yang merupakan hasil dari musrembang yang ada.

kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. pada indikator ini peneliti akan membahas mengenai kepuasan dari masyarakat terkait pembangunan prasarana yang merupakan hasil dari musrembang yang ada di Kecamatan Krayan Timur.

Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak puas dengan pembangunan prasarana desa yang merupakan hasil dari musrembang yang ada, hal ini dikarenakan masyarakat menilai bahwa pembangunan ini bukan merupakan prioritas dan kebutuhan dari masyarakat yang ada, namun ada juga masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya

pembangunan prasarana yang merupakan hasil dari musrembang yang ada.

Maka dapat dipahami bahwa pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat di Kecamatan Krayan Timur juga peningkatan pembangunan dibidang sumber daya manusia, seperti menyediakan karyawan/pegawai yang memadai di beberapa instansi pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan pertanian Kecamatan Krayan Timur.

## **2. *Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembangunan Prasarana di Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapati sejumlah faktor pendukung dan hambatan yang dirasakan dalam efektifitas pembangunan prasarana di Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara ialah sebagai berikut:

- a. Faktor pendukung dalam pembangunan prasarana di Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara bahwa Pemerintah Kecamatan Krayan Timur untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana adalah keterbukaan dan komitmen pemerintah kecamatan untuk melibatkan masyarakat. Sedangkan faktor pendukung yang dimiliki masyarakat untuk partisipasi dalam pembangunan prasarana adalah masih kuatnya sikap sosial atau gotong royongan masyarakat, kemandirian dan tingkat pendidikan masyarakat.

Prinsip masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan pembangunan desa yang baik dan berkelanjutan. upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat sangat tepat karena pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk itu sebagaimana yang tertuang diundang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa diberikan kewenangan penuh untuk mengurus pemerintah desa.

- b. Faktor penghambat dalam pembangunan prasarana di Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara adalah kurangnya kecakapan aparat desa dalam pembukaan dan pencatatan pelaporan penggunaan keuangan desa yang mengakibatkan terhambatnya penyaluran keuangan desa berimbas pada proses pembangunan desa yang merupakan langkah untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa. selain itu kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan pembangunan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Selain itu pendidikan yang masih rendah, hal ini mengakibatkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses pembangunan menjadi minim sarana dan prasarana. Faktor ini merupakan pendukung bagi terselenggaranya aktifitas Pemerintah Desa.

Faktor lain yang menghambat upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa, yakni pendidikan yang masih rendah, hal ini mengakibatkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses pembangunan menjadi minim, sarana dan prasarana, faktor ini merupakan pendukung bagi terselenggaranya aktifitas pemerintah desa. sarana dan prasarana yang harus cukup menjadi baik dari segi jumlah, dari segi kualitas dan praktis dari segi pembangunannya, syarat sarana dan prasarana yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan desa, keuangan, faktor ini adalah tulang

pungung terselenggaranya aktifitas pemerintah desa salah satunya otonomi terletak pada kemampuan dalam bidang keuangan. karena itu kemampuan keuangan ini akan sangat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pembangunan desa.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dalam penelitian ini akan memaparkan kesimpulan terkait Efektifitas Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Krayan Timur adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan prasarana di Kecamatan Krayan Timur sangat berdampak positif bagi masyarakat Kecamatan Krayan Timur, karena dengan adanya pembangunan tersebut sarana dan prasarana meningkat bila dibandingkan sebelumnya.
2. Pembangunan sarana dan prasarana publik yang dibangun Pemerintah di Kecamatan Krayan Timur, namun masyarakat berharap kepada Pemerintah agar dapat meningkatkan lagi pembangunan di Kecamatan Krayan Timur, mengingat daerah ini terletak di dataran tinggi dan jauh dari pusat ibukota Kabupaten.

### ***Saran***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan di atas, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan terkait Efektifitas Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Krayan Timur na antara lain:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara khususnya Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk dapat meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan Krayan Timur, mengingat Kecamatan Krayan Timur yang terletak di dataran tinggi dan akses yang jauh dengan pusat ibukota Kabupaten.
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara khususnya Pemerintah Kabupaten Nunukan agar dapat memprioritaskan Kecamatan Krayan Timur dalam Rencana Pembangunan Daerah mengingat daerah Kecamatan Krayan Timur sangat terpencil.
3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya Pemerintah Kabupaten Nunukan agar dapat memprioritaskan pembangunan fisik dan non fisik di Kecamatan Krayan Timur, selain itu menyediakan sumber daya manusia yang memadai di Kecamatan Krayan Timur sebagai wujud pembangunan.

## **Daftar Pustaka**

- Abdurahmat, 2003. Pengertian Efektivitas. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Agung, Kurniawan 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Poitik : Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta. PT. Balai Pustaka
- Asnawi. 2013. *"Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota"*. UMM. Malang.

- Atmosoeprapto, Kisdarto, 2002. *Menuju SDM Berdaya – Dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien*. PT.Elex Media Komputindo : Jakarta.
- Donnelly, Gibson. 1996. *Organisasi, Prilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Erlangga
- Harmantyo, Djoko. (2007). *Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan (Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia)* Departemen. Geografi, FMIPA, Universitas Indonesia, Depok [online]
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPNUlber Silalahi, *Asas-asas Manajemen*, Bandung: Refika Aditama.
- Moenir, H.A.S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Poerwadarminta. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ratnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah : Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Sondang P. Siagian, 2001. *“Manajemen Sumber Daya Manusia”*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Kencana
- The Liang Gie. 2003. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Ulum Ihyaul MD, 2004, *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: Rja Grafindo Persada
- Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.